



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Sabtu, 26 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Refleksi
Waktu	: Pukul 11.00 - 12.30 WIB	Tempat	: Halaqah Refleksi Kelas 4
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Kerja-kerja Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat Untuk Membangun Peradaban Yang Berkeadilan</i>		

Fasilitator : **1. MIRA DIARSIH**

2. SAMSIDAR

Sekretaris : **THOHIR LAILA SHOLEH**

Halaqah Refleksi

Kerja-Kerja Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat Untuk Membangun Peradaban Yang Berkeadilan

Fasilitator:

Kita mulai ya. Saya Mira, sudah 40 tahun di LSM. Setelah mengikuti dua hari yang luar biasa. Hari ini dapat sekali banyak masukan, banyak pemikiran. Satu hal yang paling penting, untuk KUPI ke tiga kita akan usulkan apa? Pertama jawablah dulu, pelajaran dan isu yang paling nyangkut? Bisa dilayanan, advokasi, penelitian. Kedua, apakah dan bagaimana hasil KUPI bisa kita bawa ke komunitas, masyarakat yang kita hidup dengan mereka. Kita bertugas menjadi panah untuk mensosialisasikan kepada komunitas dengan sangat fasih dan sangat intim. Mbak Ida dan saya, paduan Jawa dan Aceh yang bagus. Isu yang berkaitan dengan erat soal isu untuk menyosong KUPI 3. Bagaimana mempraktikkan perolehan KUPI ke komunitas. Ketiga, kalau ada komitmen untuk itu, cakap sekali.

Peserta: ini bisa disampaikan lisan langsung?

Nafilah (famplet Generasi): isu orangmuda, HAM, demokrasi. Jakarta. Apa yang sudah didapatkan di KUPI 2. Banyak masukan dalam kerja-kerja kampanye. Isu: seksual dan esehatan reproduksi. Perlindungan Jiwa per, perlindungan dari perkawinan anak dan P2GP. Yang ingin saya

sampaikan mungkin bisa lebih banyak melibatkan orang muda. Karena orang muda sekian persen menguasai media. Sehingga dapat mengkampanyekan isu ini agar lebih luas. Misalnya consent kami soal P2GP masih banyak yang denial, dianggap banyak mudharatnya. Kami sebagai anak muda.

Mira [Fasilitator]: dari diskusi di diskusi sebelumnya soal bahaya kehamilan akibat perkosaan. Apa yang bisa disebar?

Nafilah: kami produksi konten. Watchdog film tentang perkawinan anak di Indramayu. Bagaimana memproduksi konten yang impactnya lebih luas. Wadon ora dido, perempuan tidak dijual.

Windi [KPI Jawa Barat]: Fokus advokasi kebijakan. Medorong PP segera mengimplementasikan UU. Tidak implementatif, tidak ada aturan di bawahnya, tidak memperkuat lembaga di bawahnya. Kedua, penghentian tentang praktik angka perkawinan anak. Batas usia sudah dinaikan, bahkan Peraturan MA sudah ada, ini tidak menghentikan praktik di lapangan. Jadi bagaimana peran ulama? Karena pernikahan bisa terjadi melalui pernikahan siri, di bawah tangan. KPI sudah penguatan, Indramayu, Kab Bandung, kab Sukabumi, Cirebon dan Kab Bogor, kami sudah mendorong peraturan daerah stop perkawinan anak di Jawa Barat. Peraturan yang sudah ada yang sudah begitu massifnya, kami juga mendorong peraturan desa. Sistemnya sudah bagus,

Mira [Fasilitator]: iya, maka itu ya. Karena ini soal tokoh agama, kita KUPI.

Afif, PB, Jawa Timur. Tanggungjawab pendampingan korban. Kerja-kerja itu kampanye berbasis online. Kami berada di 7 wilayah. Setiap malam kami melakukan konseling 800 korban yang mengadu pada kita. Kami juga bekerjasama kami dengan berbagai komunitas. Ini sangat penting sekali bagi kami untuk perlindungan jiwa. Kita sebagai sesama perempuan harus sama-sama mendukung. Kami berupaya memberikan pemberdayaan dan pelatihan di kampus, teman komunitas, dsb, sebagai konselor sebaya. Yang sudah kita lakukan selama ini berbasis online.

Mira [Fasilitator]: apa ya perolehan KUPI, bagaimana kita mengaitkan yang sudah diperoleh dari KUPI dengan kerja yang sudah dilakukan.

Hamdanah, Univ. Islam Jember. LSM Sakina. Mohon untuk rekomendasi ke pemerintah terkait KDRT dan KS terhadap perempuan dan anak. Bagaimana polisi berpihak pada korban. Jangan sampai pertanyaan pada korban membuat korban takut. Kedua, bagaimana pemerintah sebelum menerima polisi atau jaksa ada pelatihan khusus agar mereka tidak bias, agar menjadi pelindung. Di pengadilan masih banyak kasus, korban dipojokkan. Misalnya: kenapa sampai terjadi kekerasan dll? Jangan sampai kamu ini istri yang seperti apa sehingga bisa ditempeleng.

Mira [Fasilitator]: apa yang sudah didapatkan dari proses bersama KUPI?

Hamdanah: apa yang sudah didapat di sini akan direfleksikan dengan Kyai dan Nyai yang menjadi pendamping kami sudah kenal Mbak Mira. Mulai tahun 1990 kami keliling dengan beliau, masih tidak berhenti.

Novi, Yayasan LKIS. Bergerak pada isu transformasi sosial: toleransi, hak keberagaman. Jogja. Kami sedang mendampingi kasus kelompok minoritas, penghayat keagamaan. Kami juga mengadvokasi di SISDIKNAS, kenapa karena kepercayaan dihilangkan. Putusan MK no 16 harusnya dijadikan alasan. 2024 mau dimulai, pasti ada narasi hoax, penghayat keagamaan, minoritas keagamaan, gender yang berbeda, anak muda yang selama ini dianggap formalitas, akan mengalami

diskriminasi. KUPI ini harus memperjuangkan anak muda terlibat dalam proses itu. Kami akan melakukan diskusi di Jogja. Kami akan mengajak teman-teman untuk mengawal SISDIKNAS.

Ali, Yayasan LKIS, Jogja. Terkait dua hari diskusi di KUPI. Pagi diskusi soal pengelolaan sampah. Apa yang sudah didiskusikan ini bisa menjadi pisau analisis terkait peraturan yang ada. Misal kita ngomongin soal sampah. Dalili sudah banyak. Selain ngomong soal sampah juga ngomong yang lain, ini semoga menjadi RTL. LKIS juga ngomongin demokrasi anak muda. Tujuannya untuk mendorong pemerintah di daerah untuk memberikan haknya. Terkait hoax, sekarang jadi persoalan kita semua apalagi kita akan mendekati tahun pesta demokrasi. Saya rasa ini penting.

Raka, Arjuna Pasunda. Isu respon HIV. Yang mau saya pulang. Yang ada di KUPI ini memberdayakan bagi kami. Salah satu yang sulit bagi kami itu adalah tafsir yang membuat orang sulit mengakses layanan Kesehatan. Jadi fatwa KUPI akan membantu itu.

Nurlaela, KJHAM, Semarang. Fokus kami pendampingan perempuan korban KS, riset dan advokasi. Refleksi kami dua hari ini, hasil musyawarah KUPI ini dilengkapi dengan dalil agama islam yang biasanya menjadi tantangan bagi perempuan korban KS atau isu perempuan. Sehingga informasi dalil ini bisa memperkuat kerja kami ketika ada korban perempuan ataupun kampanye. Ini menjadi Pendidikan public. Selama ini yang didengarkan itu yang kontra. Ini akan kami sampaikan ke komunitas. Berikutnya yang kami akan bawa itu membangun jejaring dengan ulama perempuan, pesantren untuk memperkuat layanan, pendampingan dan Pendidikan gender. Karena mengingat kasus di lingkungan keagamaan banyak kami damping. Refleksi kami di sini, bagaimana ke depan lebih memperkuat lagi suara perempuan yang paling miskin dan paling marjinal yang belum kita angkat. Lalu bagaimana suara perempuan korban, suara perempuan yang terdampak bencana akibat kerusakan alam, jadi fakta-fakta ini harus dibawa agar rasanya kuat. Kemudian suara semua peserta tidak ada yang tertinggal. Isu lainnya adalah isu migrasi yang harus dibawa. Kemudian keamanan perempuan dalam dunia digital. Ruang diskusi diperbanyak.

Mira [Fasilitator]: Yaya cukup sensitif, tugasnya LSM ini untuk mengajak mereka hadir di sini. Tapi interseksionalitas itu harus digarisbawahi.

Riris, Flower Aceh. Pertemuan kita sangat luar biasa. Fatwa sangat penting. Qanun Jinayah menjadi tantangan. Ini merugikan perempuan dan anak korban kekerasan. Harapannya hasil KUPI bisa dibawa ke daerah-daerah. Kedua, perhatian serius menjelang pilkada dan seterusnya soal kepemimpinan perempuan. Di Aceh itu mulai jangan ada kepemimpinan perempuan. Politisi perempuan dapat intimidasi. Dalam konteks Aceh ada hak perempuan korban konflik. Ini sebagai catatan penting. Tidak hanya di Aceh, ada juga Poso dsb. Kemudian soal isu perempuan dalam bencana. Kemudian PR itu bagaimana mensosialisasikan sampai ke desa.

Fila, Yayasan PEKKA. Tentunya setelah dari KUPI ini ada beberapa isu yang akan ditindak lanjuti di komunitas. Kepemimpinan perempuan. kemudian tentang pembagian peran dan kerja-kerja perawatan dalam concern kita. Selanjutnya terkait dengan penghapusan dan pencegahan perkawinan anak dan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Karena ini ada kendala kultural dan struktural. Kemudian soal kebencanaan, kita kerja di Aceh, Lombok, Lembata dan Cianjur. Tentunya gerakan ini akan dikuat 27 provinsi 29 kabupaten 1.000 desa. 80.000 perempuan kepala keluarga. 65 kabupaten serikat PEKKA. Klinik layanan konsultasi Klik PEKKA ini layanan untuk pemangku kepentingan. Kami juga punya pengembangan kelas kerja paralegal desa

lebih 10 desa. Forum perempuan des aini media perempuan bagi perempuan di desa, majlis perempuan yang kerjasama dengan Alimat dan KUPI. Ini semua yang akan kami bawa pulang.

Fasilitator: bisa menulis dan menyampaikan. Apa yang akan teman-teman kerjakan setelah pulang? KUPI sudah punya database kerja teman-teman. Tapi apa yang akan dilakukan?

Nanda, YKP. kami semakin yakin bahwa pemenuhan hak perempuan soal HKSR itu sangat dibutuhkan. Tapi ini memperkuat kerja. Ini sebuah mekanisme dan berjaring bersama untuk mendorong layanan bersama. Ini bukan kebutuhan pribadi tapis semua perempuan. Kemudian HRD juga punya risiko. Ini harus membuat mekanisme bersama untuk saling melindungi.

Asla, Kalyanamitra. Jakarta. Kerja-kerja di pedesaan. Kita sedang mengadvokasi ibu-ibu di Kulon Progo. Mempertemukan dua kepala: perempuan dan pemerintah desa. Harapannya dari fatwa KUPI ini bisa menjawab persoalan sistemik ini. UU Desa no 6 tahun 2014, desa punya wewenangnya sendiri untuk menentukan nasibnya.

Mira [Fasilitator]: jadi fatwa di sini untuk memperkuat.

Ana, Damar Lampung. RSC KJ HAM. Fatwa ini sangat berarti bagi kami. Karena kita hidup di mayoritas islam. Ibu-ibu nyai nusantara di Lampung untuk bida dikorelasikan dengan KUPI. Fatwa KUPI ini akan kami bawa ke komunitas dampingan kami dan kawan muda. Riset kami soal P2GP, mereka tidak tahu isu ini, mereka mengalami. Jika ditanya mereka akan melakukan hal yang sama karena tidak ada fatwa yang tegas. Kampanye media sosial.

Fatimah. Korban kekerasan dari agama. Stigma syiah dan sesat. Mencegah bahaya ekstrimisme dan perlindungan jiwa. Mensesatkan orang, mengkafirkan orang itu awalnya dari Pendidikan. Berdasarkan pengamatan saya dari guru SMA di Bandung itu terpapar. Saya mengusulkan bahwa KUPI mengkaji kurikulum tentang pengajaran agama di sekolah. Organisasi saya ada 30 pengurus organisasi. Saya akan mensosialisasikan kepada mereka. Kemudian tentang pemaksaan pernikahan anak, kurangnya KUA atau BKKBN dalam mensosialisasikan bahaya nikah dini.

Nn, Lembaga hukum HAM Aisyah Jateng. Data kami di Jawa tengah banyak perkawinan muda. Saya pusing sendiri. Setelah kami mengadakan penelitian. Izin/ dispensasi itu diberikan. Harusnya ada Kerjasama dan bisa dicegah. Setelah perkawinan itu cerai. Yang bisa dilakukan itu sosialisasi itu bisa dilakukan. Izin itu agak dipersulit.

Mira [Fasilitator]: iya ini persoalan besar. Ini bisa kita curigai ada bisnisnya.

Maryatul Aisyah, Kalsel. Komunitas Pelangi. Jaringan perempuan interfaith untuk keadilan dan perdamaian. Penguatan ekonomi. Isu perempuan bisa menjadi isu yang melintasi batas. Karena KUPI bicara kemanusiaan maka membantu sekali. Kita sangat terbantu dari KUPI 1 dan 2. Isu-isu ini akan dikonsolidasikan Kembali di komunitas. Harapannya kedepan ada workshop atau apapun untuk memperkuat hasil musyawarah. Kalsel siap untuk membantu.

Edith. Q buka tabu. Feminis dan queer. Yang mau dilakukan oleh Q buka tabu, membangun ruang diskusi untuk membahas keagamaan. Teman-teman non hetero ada tantangan soal stigma dan label. Bisa sharing kasus. Kedua, kami akan membantu menyebarkan ke organisasi internasional, khususnya situasi kekerasan. Yang paling relevan itu pemaksaan perkawinan. Ingin ada isu khusus, terafi konversi. Diskusinya jadi pintu masuk dari kelompok LGBTIQ dengan ulama perempuan. Bisa membuka ruang mungkin side event untuk kelompok

Marsia, IFAS Indonesia. Fokus di keadilan reproduksi untuk perempuan dan remaja perempuan. yang dibahas. Untuk pekerjaan IFAS, bagaimana kolega saya paham untuk progresifitas fatwa KUPI. Bagaimana sering P2GP dilakukan oleh medis tanpa consent orangtua. Petugas Kesehatan perlu dicerahkan. Kemudian untuk perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan, kami juga dibesarkan dengan ni. Jadi terus disosialisasikan dengan kawan profesi. Kami fokus ke UU TPKS dan UU Kesehatan. Soal apa yang sudah dibahas dan akan dilahirkan akan menjadi modal penting bagaimana peraturan berpihak pada perempuan.

Ai, Federasi Serikat PEKKA Indonesia. Saya sangat bersyukur bisa hadir. Ini pertama kalinya bagi saya. Ini hal yang berharga. Kami sudah bekerja di wilayah. Tantangan yang kami hadapi itu bukan hanya dengan pemerintah tapi kelompok agama karena berhubungan dengan dalil-dalil, ini akan memperkuat kerja-kerja kami di lapangan.

Firly, Program Inklusi. Perkawinan anak dan perempuan disabilitas dalam perkawinan. Diskusi kami adalah forum ini sangat membantu kerja-kerja teman di daerah. Bicara perkawinan anak tidak hanya bicara UU tapi agama. KUPI membawa wacana baru karena dikaitkan dengan agama. Karena pemerintah biasanya melarikannya ke agama. Ada catatan, advokasi dari luar agama islam. Bagaimana ngomong ayatnya ya. Ini jadi catatan teman di daerah.

Mira [Fasilitator]: perlu narasi kampanye kita dimuati dengan proses halaqah kita. Ada lagi kah?

Alya, INFID. Kami ada ham demokrasi, ekstrisism, kota HAM. Hasil diskusi KUPI sangat menarik. Kita ada program kota HAM, ada pelatihan. Hasil diskusi KUPI akan menjadi bekal narasi . KUPI selanjutnya ada isu bisnis dan HAM. Kemudian perubahan iklim dan meingkatkan lingkungan yang berkelanjutan.

Fasilitator: YKP, melakukan pemberdayaan pesantren tentang HKS. YKP akan sharing tentang pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dengan metode menarik dari WHO.

Mira [Fasilitator]: Mbak Ida sudah menuliskan. Tapi yang paling penting adalah ada kebutuhan untuk mengeksplorasi soal isu interseksioanliatas mereka secara ekonomi, isu LGBT, pembahasan di ruang privat yang ditutupi, isu bencana. Menyampaikan, mensosialisasikan, catatan penting mohon menggunakan jaringan yang ada diperkuat, jadi menguatkan kerja kita dan penemuan baru kita dari tiga hari. Kalau yang kuno jadi titik berangkatnya, kita harus punya fatwa antara sebelum ke final. Memperbanyak akses keterlibatan anak muda dan yang lain.

Ida: sangat banyak itu adalah bagaimana bekerja berkolaborasi.

Mira [Fasilitator]: baiklah, cukup ya. Semua sudah menyampaikan semua. Kita tutup dan berfoto bersama.